



SKRIPSI

Judul:

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta
Autentik Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
(Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023)

Disusun oleh:

MARTIN RICH ARIANTO
NIM. 205210204

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN
AKTA AUTENTIK DITINJAU BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR
933 K/PID/2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Martin Rich Arianto
NIM : 205210204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : MARTIN RICH ARIANTO
NIM : 205210204
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023)
Title : The Notary's Liability for the Forgery of Authentic Deeds in Light of Indonesian Positive Law (A Case Study of Supreme Court Decision Number 933 K/Pid/2023)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

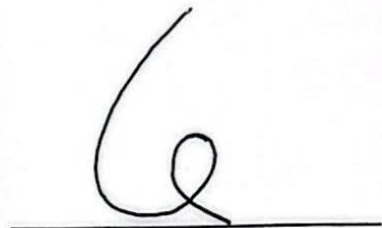
Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MARTIN RICH ARIANTO
NIM : 205210204
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta
Autentik Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
(Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Desember-2024

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

Aktivitas jual beli tanah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam aktivitas tersebut seorang notaris merupakan orang yang bertanggungjawab dalam proses transaksi jual beli tersebut melalui pembuatan suatu akta autentik. Tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam proses pembuatan akta autentik dan apabila notaris tersebut melakukan suatu pemalsuan terhadap suatu akta autentik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada peninjauan kaidah norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk suatu kebenaran koheren sejati sesuai hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang memberikan gambaran mengenai analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta autentik ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023). Seringkali terjadi pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab hukum seorang notaris mencakup kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan hukum dan kode etik profesi yang berlaku. Ketentuan ini secara eksplisit menetapkan bahwa seorang notaris yang melanggar kewajibannya sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat dikenai berbagai bentuk sanksi hukum. Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam ketentuan ini adalah sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa seorang notaris bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci: Akta Autentik, Pemalsuan Akta, Pertanggungjawaban Notaris

ABSTRACT

Land sale and purchase activities are one form of transaction in a society's life. In such activities, a notary is the person responsible for the process of the sale and purchase transaction by drafting an authentic deed. The objective of this research, as conveyed by the author, is to understand the accountability of notaries in the process of drafting authentic deeds and to examine the consequences if a notary commits forgery of an authentic deed. The research conducted by the author uses a normative juridical approach, focusing on reviewing the norms of positive legal principles. Normative juridical research aims to achieve coherent truth in accordance with positive law. This study is descriptive and analytical, providing an analysis of the applicable laws and regulations. The focus of this research is the responsibility of notaries concerning the forgery of authentic deeds, viewed based on Indonesia's positive law (Case Study of Cassation Decision Number 933 K/Pid/2023). Forgery of deeds by notaries often occurs to gain personal benefits. As stipulated in Article 9 paragraph (1) letter d of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding the Notary Position, the legal responsibility of a notary includes the obligation to comply with all applicable legal provisions and the professional code of ethics. This provision explicitly states that a notary who violates their obligations as an official authorized to draft authentic deeds may be subject to various legal sanctions. One of the sanctions stipulated in this provision is administrative sanctions in the form of temporary dismissal from their position. These sanctions are intended to serve as a deterrent effect and ensure that a notary acts in accordance with the principles of justice and legal compliance in carrying out their duties.

Keywords: *Authentic Deeds, Deed Forgery, Notary Liability*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 933 K/PID/2023)”. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan melaksanakan ujian akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan diselesaikan tanpa adanya dukungan serta bantuan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 933 K/PID/2023)”.

6. Kedua Orang Tua, Koko, dan Cici yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materiil maupun moril yang sangat mendalam terhadap saya selama menjalani dan menjejarkan skripsi.

Jakarta, 06 Desember 2024

Penulis

Pernyataan

Nama : MARTIN RICH ARIANTO
NIM : 205210204
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta
Autentik Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
(Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Desember-2024
Yang menyatakan



MARTIN RICH ARIANTO
NIM. 205210204

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	17
4. Pendekatan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORITIS	22
A. Teori Tanggung Jawab	22
B. Teori Perlindungan Hukum	24
C. Teori Keadilan	26
D. Teori Akuntabilitas	31

BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	33
	A. Kasus Posisi	33
	B. Hasil Wawancara	35
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	59
	A. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Dengan Pemalsuan Akta Autentik	59
	B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)	77
BAB V	PENUTUP	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR SINGKATAN

AJB	: Akta Jual Beli
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i>
DKD	: Dewan Kehormatan Daerah
DKN	: Dewan Kehormatan Notaris
DKP	: Dewan Kehormatan Pusat
DKW	: Dewan Kehormatan Wilayah
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
INI	: Ikatan Notaris Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MKN	: Majelis Kehormatan Notaris
MPD	: Majelis Pengawas Daerah
MPW	: Majelis Pengawas Wilayah
Peraturan DKP 1/2017	: Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari
PPJB	: Perjanjian Pengikatan Jual Beli
UUJN	: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UUJN Perubahan	: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan
Lampiran 5	: Hasilnya Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: Surat Keterangan Penerimaan (<i>Letter of Acceptance</i>) Jurnal
Lampiran 9	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	: Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 11	: Putusan Pengadilan